

## ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Nana Talia<sup>1</sup>, Alexandra Hukom<sup>2</sup>  
Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya

Correspondence		
Email: nanatalia1718@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 25 April 2024	Accepted 1 Mei 2024	Published 2 Mei 2024

### ABSTRACT

*The aim of this research is to examine how Local Own-source Revenue (PAD), Regional Expenditure, and Regional Financing impact the financial independence of Palangka Raya City. In this context, financial independence is defined as the ability of local government to generate revenue autonomously while reducing dependency on income from external sources. This study employs Local Own-source Revenue (PAD), Regional Expenditure, and Regional Financing as independent variables. The cause-and-effect relationship between the independent variables and regional financial independence is evaluated using path analysis. The research findings indicate a significant relationship between PAD, Regional Expenditure, and Regional Financing with regional financial independence. PAD and Regional Expenditure have a significant positive influence on regional financial independence, while Regional Financing shows a significant negative influence. These findings provide valuable insights for local governments in formulating more effective fiscal policies to enhance regional financial independence.*

**Keyword:** Regional Financial Independence, Local Own-source Revenue, Regional Expenditure, Regional Financing, Path Analysis.

### Pendahuluan

Sebagai salah satu kota penting di Indonesia, Kota Palangka Raya memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam konteks dinamika ekonomi dan keuangan yang terus berubah, tantangan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah semakin kompleks dan menuntut. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakatnya. Untuk mencapai hal ini, kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting. Kemandirian keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya finansialnya secara efisien, mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal, dan meningkatkan kemandirian dalam pengambilan keputusan keuangan.

Namun, mencapai kemandirian keuangan daerah bukanlah tugas yang mudah dalam praktiknya. Kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk pembiayaan daerah, belanja daerah, dan PAD. Akibatnya, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi satu sama lain dan bagaimana berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Dalam model tata kelola otonomi daerah ini, daerah diminta untuk menggunakan PAD dengan lebih inovatif untuk mendapatkan sumber keuangan. Dengan meningkatkan PAD mereka setiap tahun, daerah harus menurunkan ketergantungan keuangan mereka terhadap pemerintah pusat. PAD adalah pilar pembiayaan daerah dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan daerah. Daerah dengan PAD yang semakin besar juga dianggap lebih berhasil dalam pengelolaannya. Daerah yang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menggali PAD mereka juga biasanya memiliki lebih banyak kemajuan dalam pembangunan. Oleh karena itu, PAD lebih penting diperhatikan

daripada sumber penerimaan daerah lainnya karena sumber-sumber ini menunjukkan bahwa daerah semakin tergantung pada pemerintah pusat.

Halim (2011:253) menyatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak bergantung pada kemampuan keuangan daerah; artinya, daerah harus memiliki otoritas untuk menggunakan sumber daya keuangan mereka sendiri, mengelolanya, dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan meminimalkan ketergantungan mereka pada pemerintah pusat untuk menggunakan PAD sebagai sumber daya keuangan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dengan lebih hati-hati dan cepat. Menurut Halim (2007:5), pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana yang mereka gunakan adalah dana masyarakat, dan DPRD harus memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa dana masyarakat digunakan dengan benar untuk pembangunan daerah.

Halim (2007:231) menyatakan bahwa rasio kemandirian (ekonomi fiskal), rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio dekking layanan daerah adalah beberapa metrik yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan keuangan daerah. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi kecenderungan. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan mereka menunjukkan kemandirian keuangan daerah. Perbandingan antara pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau pinjaman, sangat kecil (Hehamahua). Dibandingkan dengan dana yang berasal dari pinjaman dan bantuan pemerintah pusat, derajat kemandirian menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri operasinya. Dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah disebut sebagai derajat kemandirian (Zukhri, 2020). Semakin besar rasio kemandirian keuangan suatu daerah, semakin sedikit ketergantungannya terhadap pemerintah pusat secara fiskal. Jumlah kemandirian keuangan daerah yang lebih besar juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin terlibat dalam mendukung proses pembangunan yang difasilitasi oleh otonomi daerah.

Dalam hal pembangunan lokal, penelitian tentang cara PAD, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika keuangan daerah karena pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan, mendukung kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah akan membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategis.

### Metode Penelitian

Desain Penelitian: Untuk menilai pengaruh variabel independen—Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah—terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Palangka Raya, penelitian ini menggunakan analisis jalur. Analisis jalur dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut dan menemukan jalur kausal yang dapat memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Data Penelitian: PAD, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah digunakan sebagai variabel independen dalam laporan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya. Kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai variabel dependen. Data ini dikumpulkan selama jangka waktu tertentu, yang relevan dengan tujuan

penelitian.

Variabel Penelitian:

Variabel independen (X) dalam penelitian ini terdiri dari:

- X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2: Belanja Daerah
- X3: Pembiayaan Daerah

Variabel dependen (Y) adalah Pendapatan Daerah => Kemandirian Keuangan Daerah

Alat dan Metode Analisis:

Analisis jalur (Path Analysis) memerlukan penggunaan perangkat lunak statistik yang dapat menangani model persamaan struktural kompleks dan menggunakan perangkat lunak untuk melakukan analisis jalur pada penelitian ini adalah **Mplus**. Analisis jalur (Path Analysis) melibatkan beberapa langkah analisis statistik yang sistematis:

- Spesifikasi Model: Langkah pertama adalah merumuskan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Ini melibatkan identifikasi variabel independen, dependen, dan mediator, serta menentukan jalur kausal yang akan diuji.
- Estimasi Model: Setelah spesifikasi model, parameter-parameter model diestimasi menggunakan teknik statistik tertentu, seperti metode kuadrat terkecil atau metode maksimum likelihood. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak statistik untuk menghitung koefisien jalur dan menguji signifikansi parameter.
- Evaluasi Model: Model yang diestimasi dievaluasi menggunakan berbagai kriteria statistik, seperti goodness-of-fit indices, untuk menilai sejauh mana model sesuai dengan data. Evaluasi ini membantu peneliti untuk mengevaluasi kecukupan dan keakuratan model.
- Uji Hipotesis: Setelah evaluasi model, uji hipotesis dilakukan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel-variabel dalam model. Ini melibatkan penggunaan statistik inferensial untuk menentukan apakah hubungan antara variabel-variabel signifikan secara statistik.
- Interpretasi Hasil: Hasil analisis jalur diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Ini melibatkan penafsiran koefisien jalur, efek langsung dan tidak langsung, serta analisis sensitivitas terhadap model.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil pengumpulan data yang diambil dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Palangka Raya dari tahun 2011 sampai dengan Maret 2024, *Sumber* : *Direktrat Jenderal Perimbangan Keuangan*.

Table 1. Data

UNIVARIATE HIGHER-ORDER MOMENT DESCRIPTIVE STATISTICS

Variable/ Sample Size	Mean/ Variance	Skewness/ Kurtosis	Minimum/ Maximum	% with Min/Max	Percentiles		
					20%/60%	40%/80%	Median
BIAYA 14.000	155.054 83748.111	1.494 0.424	1.012 845.000	7.14% 7.14%	1.139 1.240	1.222 58.000	1.239
PENDAPAT 14.000	54.929 592.923	-0.060 -1.415	17.000 88.000	7.14% 7.14%	29.000 57.000	47.000 84.000	57.000
MANDIRI 14.000	42.214 731.168	0.675 -0.448	1.000 101.000	7.14% 7.14%	20.000 40.000	27.000 59.000	33.500
PAD 14.000	134.643 3345.515	-0.142 -1.011	45.000 240.000	7.14% 7.14%	60.000 161.000	130.000 175.000	146.500
BELANJA 14.000	40.097 1214.769	0.169 -1.599	1.000 97.000	7.14% 7.14%	2.000 49.000	17.000 72.000	35.500

NO CONVERGENCE. NUMBER OF ITERATIONS EXCEEDED.

Berikut adalah format interpretasi hasil penelitian berdasarkan analisis jalur (Path Analysis) untuk penelitian "Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palangka Raya":

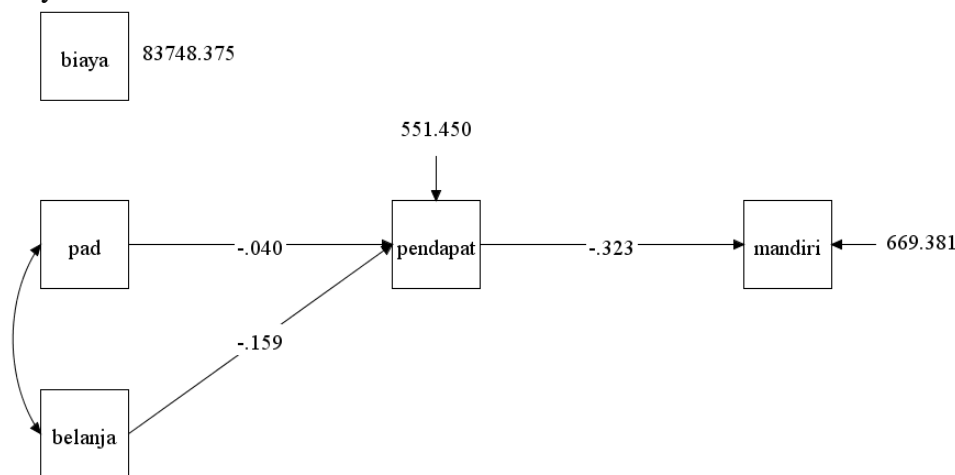
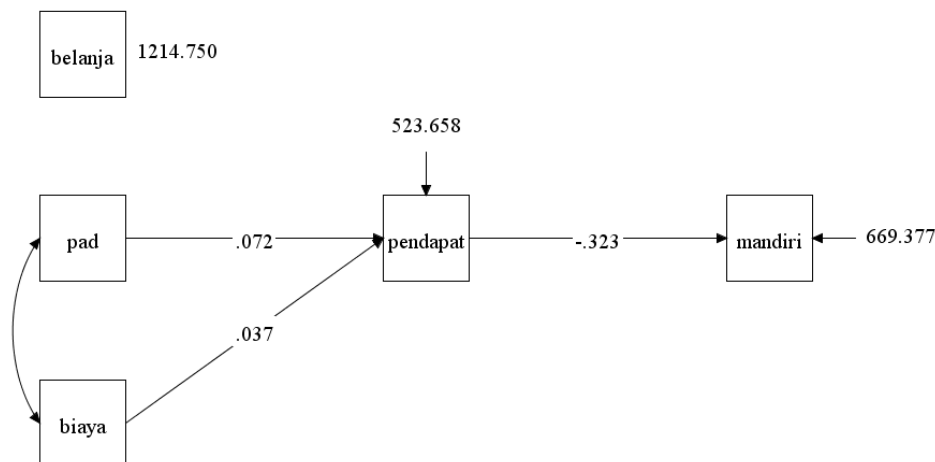


Diagram 1. Hasil Analisis Data Pertama

Variabel PAD dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Daerah :

- Saat variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Belanja Daerah dihitung bersama, terdapat pengaruh negatif terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,40% (X1) dan 15,9% (X2). Artinya, setiap kenaikan satu satuan dalam variabel PAD dan Belanja Daerah akan menyebabkan penurunan Pendapatan Daerah sebesar 0,40% dan 15,9%, secara berturut-turut.
- Terdapat pengaruh positif dari luar Pendapatan Daerah (faktor lain yang tidak dimodelkan) sebesar 551.450%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar variabel yang dipertimbangkan dalam model yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- Pendapatan Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 3,23%. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Daerah, kemandirian keuangan daerah cenderung menurun.





**Diagram 2.** Hasil Analisis Data Kedua

Variabel PAD dan Biaya Daerah terhadap Pendapatan Daerah :

- Saat variabel PAD dan Biaya Daerah dihitung bersama, terdapat korelasi yang positif terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,72% (X1) dan 0,37% (X3). Artinya, setiap kenaikan satu satuan dalam variabel PAD dan Biaya Daerah akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Daerah sebesar 0,72% dan 0,37%, secara berturut-turut.
- Terdapat pengaruh positif dari luar Pendapatan Daerah (faktor lain yang tidak dimodelkan) sebesar 523.658%. Ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar variabel yang dipertimbangkan dalam model yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- Pendapatan Daerah masih memiliki pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 3,23%. Ini menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Daerah masih berdampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari hasil analisis data di atas, beberapa fakta yang dapat diungkapkan adalah:

- Pengaruh Positif dari Faktor Eksternal terhadap Pendapatan Daerah: Faktor eksternal, atau faktor di luar Pendapatan Daerah, memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model, seperti pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan fiskal nasional, atau investasi asing, memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Ini dapat terjadi karena kebijakan atau peristiwa eksternal yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pengaruh Negatif Pendapatan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah: Pendapatan daerah memiliki pengaruh yang rendah terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah cenderung menurun seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Ini mungkin karena pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada sumber pendapatan luar dan kurang mampu menghasilkan pendapatan sendiri ketika pendapatan mereka meningkat.

Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan PAD, Belanja Daerah, dan upaya meningkatkan Pendapatan Daerah harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mendukung kemandirian keuangan daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah perlu diimbangi dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan eksternal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan strategi pendapatan lokal yang berkelanjutan, pengendalian belanja daerah yang efektif, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan fakta yang telah diungkapkan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan berbagai strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa kesimpulan dan solusi yang dapat diusulkan:

- **Diversifikasi Pendapatan Daerah** : Pemerintah daerah perlu berupaya untuk diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi potensial, seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan perdagangan lokal. Diversifikasi pendapatan akan meningkatkan ketahanan keuangan daerah terhadap fluktuasi ekonomi dan ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal.
- **Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan** : Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan PAD dan belanja daerah. Hal ini mencakup optimalisasi pendapatan daerah, pengendalian belanja yang lebih ketat, dan pengurangan pemborosan anggaran. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan akan membantu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- **Promosi Investasi dan Kemitraan** : Pemerintah daerah perlu aktif mempromosikan investasi lokal dan menarik investasi asing untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun kemitraan dengan sektor swasta, organisasi non-profit, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan proyek-proyek yang berdampak secara ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.
- **Penguatan Kapasitas Kelembagaan** : Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang berkelanjutan, melakukan analisis risiko keuangan, dan melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan anggaran.
- **Transparansi dan Akuntabilitas** : Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini meliputi penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan mudah diakses bagi publik, pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta penerapan mekanisme pengawasan independen untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah daerah akan dapat mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

## Referensi

- Sulistiana Silondae, Nasrul, La Ode Bahana Adam (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kendari. *Journal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (NERACA)*, 1 (2): 306–315.
- Dicky Perwira Ompusunggu, Depy Rizkika Indria Sutrisno, Alexandra Hukom (2023). Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia (*MANDALIKA*), 2828-495x.
- Dwi Purnamasari Isnaini Rodiyah (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 – 2014 (*JKMP*), 5 (1), Maret 2017, 75-92

- Richardo Saragih, Nurlinda (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022 (*Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*), 2620-5866.
- Jenderal Rektorat Perimbangan Keuangan (2024). Postur APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya Tahun 2011-2024
- Framita Ester Sigiro, Alexandra Hukom, Benius, Dicky Perwira Ompusunggu (2023). Makro Ekonomi, Tabungan Masyarakat, dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah (*GROWTH*), 9 (1) :2460-5204
- Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). Diah Komariah, Mukhammad Yogiantoro , Alexandra Hukom. 4, 523–532.